

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
INTISARI	vii
ABSTRACTS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kekuasaan Eksekutif.....	12
1. Kekuasaan Pemerintahan (<i>Executive Power</i>)	12
2. Paradigma Menteri Sebagai Pelaksana Kekuasaan Pemerintahan.....	20
B. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (<i>Out Of Court Settlement</i>)	25
1. Penyelesaian Sengketa Alternatif (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	26
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Semi-Yudisial (<i>Quasi Judicial</i>)	29
C. Peraturan Perundang-undangan	33
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	33
2. Pencabutan dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan	42
3. Hak Menguji (<i>toetsingrecht</i>)	44
BAB III METODE PENELITIAN	48

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Data	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	53
D. Lokasi, Responden, Dan Narasumber Penelitian.....	55
E. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Diterbitkannya Permenkumham No. 32 Tahun 2017.....	57
1. Faktor Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkatan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.....	57
2. Faktor Penanganan Perkara Hak Uji Materil di Mahkamah Agung	72
B. Implementasi Permenkumham No. 32 Tahun 2017 Dalam Menyelesaikan Sengketa Peraturan Perundang-undangan.....	81
1. Analisis Potensi Ambiguitas Pengaturan Dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2017 Dilihat Dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	81
2. Implementasi Permenkumham No. 32 Tahun 2017 Dalam Menyelesaikan Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-Litigasi.....	101
3. Efektivitas Mekanisme Permenkumham No. 32 Tahun 2017 Dalam Menyelesaikan Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-Litigasi.....	124
C. Kualifikasi Konseptual Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-Litigasi Dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2017	134
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150